

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : SP DIPA- 013.10.1.409288/2020**

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013) | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI |
| 2. Unit Organisasi | : (10) | BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL |
| 3. Provinsi | : (01) | DKI JAKARTA |
| 4. Kode>Nama Satker | : (409288) | BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL |
| Sebesar | : Rp. | 42.721.171.000 (EMPAT PULUH DUA MILIAR TUJUH RATUS DUA PULUH SATU JUTA SERATUS TUJUH PULUH SATU RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	42.721.171.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|-------------------|-----------|----------------|
| 1. KPPN JAKARTA V | (139) Rp. | 42.721.171.000 |
|-------------------|-----------|----------------|

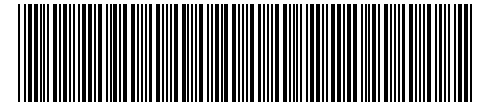
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Jakarta, 12 November 2019
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2020

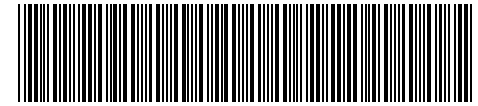


DS:4726-6626-6670-3569

Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

12	Program Pembinaan Hukum Nasional	Rp.	42.721.171.000
12.1610	Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional	Rp.	1.749.425.000
12.1611	Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	Rp.	2.289.900.000
12.1612	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	Rp.	2.895.500.000
12.1613	Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional	Rp.	1.702.509.000
12.1614	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN	Rp.	34.083.837.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2020
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4726-6626-6670-3569

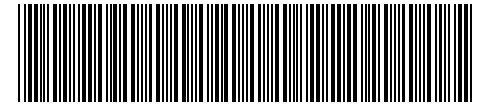
Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Kuasa Pengguna Anggaran : Audy Murfi MZ, S.H., M.H.
Bendahara Pengeluaran : Lianawati Rahayu, S.H.
Pejabat Penanda Tangan SPM : Tuyono, S.H.

Halaman : I A. 1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN		42.721.171.000
Sub Fungsi	03.03	PEMBINAAN HUKUM		42.721.171.000
2 Program	013.10.12	Program Pembinaan Hukum Nasional		42.721.171.000
Hasil (Outcome)	01	Terwujudnya Pembinaan Hukum		
IKU Program	01	Jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional		
	02	Jumlah RUU dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP, dan Program Penyusunan Perpres yang sesuai dengan arah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional		
	03	Jumlah anggota JDIH yang memberikan layanan informasi hukum yang terintegrasi		
	04	Jumlah Desa Sadar Hukum yang terbentuk di seluruh wilayah		
	05	jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum		
Kegiatan	1610	Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional		1.749.425.000
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah anggota Jaringan Hukum yang terintegrasi secara online dalam Sistem Jaringan Informasi Hukum Nasional		
	02	Data Hukum Yang Dikelola Dan Terintegrasi Dalam Database Sistem Jaringan Informasi Hukum Nasiona		
Keluaran (Output)	1610.001	Sasaran Anggota JDIH	25,00 Anggota	1.203.315.000
	1610.002	Jumlah Layanan Pemustaka Offline dan Online	100,00 Dokumen	546.110.000
Kegiatan	1611	Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional		2.289.900.000
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum Sebagai Bahan Kebijakan dan Pembangunan		
	02	Tersusunnya Dokumen Pembangunan Hukum Nasional		
Keluaran (Output)	1611.001	Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum	12,00 Rekomendasi	1.718.390.000
	1611.002	Penyusunan SOP Mengenai Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Analisis dan Evaluasi Hukum	1,00 Dokumen	121.510.000
	1611.005	Dokumen Pembangunan Hukum Nasional	1,00 Dokumen	450.000.000
Kegiatan	1612	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum		2.895.500.000
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah Desa/Kelurahan sadar hukum yang terbentuk di setiap wilayah		
	02	Jumlah Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan		
	03	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Seluruh Kantor Wilayah		
	04	Jumlah JFT Penyuluh Hukum yang terbentuk		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2020
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4726-6626-6670-3569

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Kuasa Pengguna Anggaran : Audy Murfi MZ, S.H., M.H.
Bendahara Pengeluaran : Lianawati Rahayu, S.H.
Pejabat Penanda Tangan SPM : Tuyono, S.H.

Halaman : I A. 2

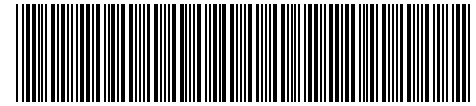
Indikator Kinerja Kegiatan	05	Jumlah Media Penyuluhan dan Bantuan Hukum yang terbentuk		
	06	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum		
Keluaran (Output)	1612.001	Desa Sadar hukum	175,00 Desa/Kelurahan	1.153.893.000
	1612.002	Layanan Penyuluhan Hukum	150,00 Kegiatan	237.195.000
	1612.003	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Seluruh Kantor Wilayah	33,00 Kantor Wilayah	754.185.000
	1612.004	Penyuluh Hukum Nasional	50,00 Penyuluh	750.227.000
Kegiatan	1613	Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional		1.702.509.000
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Tersusunnya Dokumen Program legislasi dan terlaksananya fasilitas program legislasi daerah/program pembentukan peraturan daerah		
	02	Jumlah Naskah Akademik RUU Yang Dhasilkan		
	03	Jumlah Naskah Akademik RUU Yang Diselaraskan		
Keluaran (Output)	1613.001	Dokumen Program Legislasi	3,00 Dokumen	680.568.000
	1613.002	Naskah Akademik RUU	3,00 Naskah Akademik	391.941.000
	1613.003	Penyelarasan Naskah Akademik	15,00 Penyelarasan	480.000.000
	1613.004	Penyusunan Naskah Akademik RUU Badan Usaha	1,00 Naskah Akademik	150.000.000
Kegiatan	1614	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN		34.083.837.000
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Tersusunnya dokumen rencana program dan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu		
	02	Terselenggaranya layanan keuangan yang akuntabel dan transparan		
	03	Terselenggaranya layanan data dan informasi BPHN		
	04	Terselenggaranya reformasi birokrasi BPHN dan SPIP		
	05	Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan aparatur BPHN dengan didukung administrasi yang akuntabel dan tepat waktu		
	06	Terbangunnya citra positif BPHN administrasi kerjasama dan terselenggaranya sistem penatausahaan dan kearsipan BPHN		
	07	Terselenggaranya pengelolaan BMN yang akuntabel dan transparan		
	08	tersediannya dukungan sarana dan prasarana/gedung/bangunan		
	09	terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran		
Keluaran (Output)	1614.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1,00 Layanan	2.940.590.000
	1614.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1,00 Layanan	6.387.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2020

I A. INFORMASI KINERJA



DS:4726-6626-6670-3569

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Kuasa Pengguna Anggaran : Audy Murfi MZ, S.H., M.H.
Bendahara Pengeluaran : Lianawati Rahayu, S.H.
Pejabat Penanda Tangan SPM : Tuyono, S.H.

Halaman : I A. 3

1614.994

Layanan Perkantoran

1,00 Layanan

24.756.247.000

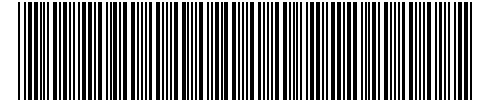
Jakarta, 12 November 2019

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.

Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2020
I B. SUMBER DANA**



DS:4726-6626-6670-3569

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

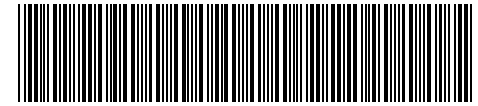
Halaman : I B. 1

			Pagu		Ekuivalen Rupiah		
1. Anggaran Tahun 2020	Rp.	42.721.171.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	42.721.171.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0	
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0	
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0	
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0	

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2020
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4726-6626-6670-3569

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
409288	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	15.680.453	20.379.718	6.661.000	-	-	42.721.171		
013.10.12	Program Pembinaan Hukum Nasional	15.680.453	20.379.718	6.661.000	-	-	42.721.171		
1610	Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional	-	1.689.425	60.000	-	-	1.749.425		
1610.001	Sasaran Anggota JDIHN	-	1.153.315	50.000	-	-	1.203.315	01 . 00	
01	RM	-	1.153.315	50.000	-	-	1.203.315	139	
1610.002	Jumlah Layanan Pemustaka Offline dan Online	-	536.110	10.000	-	-	546.110	01 . 00	
01	RM	-	536.110	10.000	-	-	546.110	139	
1611	Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	-	2.289.900	-	-	-	2.289.900		
1611.001	Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum	-	1.718.390	-	-	-	1.718.390	01 . 00	
01	RM	-	1.718.390	-	-	-	1.718.390	139	
1611.002	Penyusunan SOP Mengenai Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Analisis dan Evaluasi Hukum	-	121.510	-	-	-	121.510	01 . 00	
01	RM	-	121.510	-	-	-	121.510	139	
1611.005	Dokumen Pembangunan Hukum Nasional	-	450.000	-	-	-	450.000	01 . 00	
01	RM	-	450.000	-	-	-	450.000	139	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2020
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4726-6626-6670-3569

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1612	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	-	2.681.500	214.000	-	-	2.895.500		
1612.001	Desa Sadar hukum	-	1.138.893	15.000	-	-	1.153.893	01 . 00	
01	RM	-	1.138.893	15.000	-	-	1.153.893	139	
1612.002	Layanan Penyuluhan Hukum	-	237.195	-	-	-	237.195	01 . 00	
01	RM	-	237.195	-	-	-	237.195	139	
1612.003	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Seluruh Kantor Wilayah	-	555.185	199.000	-	-	754.185	01 . 00	
01	RM	-	555.185	199.000	-	-	754.185	139	
1612.004	Penyuluh Hukum Nasional	-	750.227	-	-	-	750.227	01 . 00	
01	RM	-	750.227	-	-	-	750.227	139	
1613	Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional	-	1.702.509	-	-	-	1.702.509		
1613.001	Dokumen Program Legislasi	-	680.568	-	-	-	680.568	01 . 00	
01	RM	-	680.568	-	-	-	680.568	139	
1613.002	Naskah Akademik RUU	-	391.941	-	-	-	391.941	01 . 00	
01	RM	-	391.941	-	-	-	391.941	139	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2020
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4726-6626-6670-3569

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1613.003	Penyelarasan Naskah Akademik	-	480.000	-	-	-	480.000	01 . 00	
01	RM	-	480.000	-	-	-	480.000	139	
1613.004	Penyusunan Naskah Akademik RUU Badan Usaha	-	150.000	-	-	-	150.000	01 . 00	
01	RM	-	150.000	-	-	-	150.000	139	
1614	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN	15.680.453	12.016.384	6.387.000	-	-	34.083.837		
1614.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	-	2.940.590	-	-	-	2.940.590	01 . 00	
01	RM	-	2.940.590	-	-	-	2.940.590	139	
1614.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	-	-	6.387.000	-	-	6.387.000	01 . 00	
01	RM	-	-	6.387.000	-	-	6.387.000	139@	
1614.994	Layanan Perkantoran	15.680.453	9.075.794	-	-	-	24.756.247	01 . 00	
01	RM	15.680.453	9.075.794	-	-	-	24.756.247	139	
JUMLAH		15.680.453	20.379.718	6.661.000	-	-	42.721.171		

Jakarta, 12 November 2019
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2020
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:4726-6626-6670-3569

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	409288	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL													
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.399.187	2.250.768	5.322.747	6.977.275	6.050.365	5.057.769	3.403.267	2.473.343	2.947.905	2.303.510	2.362.920	2.172.115	42.721.171
		51 BELANJA PEGAWAI	1.011.594	1.191.617	1.179.545	1.178.023	2.188.714	2.127.293	1.146.366	1.152.008	1.145.649	1.094.759	1.077.076	1.187.809	15.680.453
		52 BELANJA BARANG	387.593	1.059.151	3.485.619	3.440.252	1.276.234	1.921.476	2.256.901	1.321.335	1.752.256	1.208.751	1.285.844	984.306	20.379.718
		53 BELANJA MODAL	0	0	657.583	2.359.000	2.585.417	1.009.000	0	0	50.000	0	0	0	6.661.000
013.10.12.1610		Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional	0	34.578	279.284	141.298	125.232	209.694	495.956	89.411	154.896	37.921	151.139	30.016	1.749.425
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	34.578	279.284	141.298	125.232	199.694	495.956	89.411	104.896	37.921	151.139	30.016	1.689.425
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	10.000	0	0	50.000	0	0	0	60.000
013.10.12.1611		Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	0	80.680	380.340	445.803	216.309	156.725	226.517	288.451	167.154	88.251	158.930	80.740	2.289.900
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	80.680	380.340	445.803	216.309	156.725	226.517	288.451	167.154	88.251	158.930	80.740	2.289.900
013.10.12.1612		Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	40.802	105.491	128.961	1.445.970	129.131	466.697	199.458	83.195	88.249	106.559	96.734	4.253	2.895.500
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	40.802	105.491	128.961	1.430.970	129.131	267.697	199.458	83.195	88.249	106.559	96.734	4.253	2.681.500
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	15.000	0	199.000	0	0	0	0	0	0	214.000
013.10.12.1613		Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional	27.155	92.185	188.013	341.908	89.386	107.738	159.768	78.011	237.182	119.252	202.519	59.392	1.702.509
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	27.155	92.185	188.013	341.908	89.386	107.738	159.768	78.011	237.182	119.252	202.519	59.392	1.702.509
013.10.12.1614		Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN	1.331.230	1.937.834	4.346.149	4.602.296	5.490.307	4.116.915	2.321.568	1.934.275	2.300.424	1.951.527	1.753.598	1.997.714	34.083.837
		51 BELANJA PEGAWAI	1.011.594	1.191.617	1.179.545	1.178.023	2.188.714	2.127.293	1.146.366	1.152.008	1.145.649	1.094.759	1.077.076	1.187.809	15.680.453
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	319.636	746.217	2.509.021	1.080.273	716.176	1.189.622	1.175.202	782.267	1.154.775	856.768	676.522	809.905	12.016.384
		53 BELANJA MODAL	0	0	657.583	2.344.000	2.585.417	800.000	0	0	0	0	0	0	6.387.000

Jakarta, 12 November 2019
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2020
IV. C A T A T A N**



DS:4726-6626-6670-3569

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [10] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [409288] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Halaman : IV. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
409288	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 2.784.917		
	53 Belanja Modal Rp. 2.784.917		
013.10.12	Program Pembinaan Hukum Nasional		
1614	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN		
1614.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		
	532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin(RM)		
	Catatan Pengadaan kendaraan bermotor roda 4 sebanyak 1 unit dan roda 2 sebanyak 10 unit		
	533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan(RM)		
	Catatan Renovasi gedung bangunan seluas 747 m2		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.784.917		
	Perlu dilampiri data dukung terkait		
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		

Jakarta, 12 November 2019
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003